

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang pembinaan kompetensi aparatur dengan tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Dengan demikian, maka Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD membuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2019 diupayakan terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2019, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jambi. serta harus menjadi acuan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, berupaya melakukan evaluasi dan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik.

Rancangan Rencana Kerja ini merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh sub unit kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tahun 2019 dibuat oleh Tim Penyusun pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dan mengikat seluruh komponen/jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan kompetensi aparatur.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi

Aparatur Pemerintah dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Permendagri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- h. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi
- j. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi unit-unit dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dinas-Dinas Teknis. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. lembaga-lembaga teknis dan Rumah sakit daerah Provinsi Jambi
- k. Instruksi Gubernur Jambi. Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Diklat Satu Pintu.
- l. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tentang Penunjukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019, pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Agar mampu tetap tampil secara konsisten. responsive dan unggul pada persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat

dewasa ini. maka suatu instansi pemerintah harus dinamis dan menyesuaikan kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut harus gradual. konsisten dan berkelanjutan. sehingga dapat meningkatkan

akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Untuk mencapai hasil yang optimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu rencana yang menjelaskan mengenai berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut tujuan dari Rancangan Rencana Kerja ini adalah:

1. Menjadi perekat dan pemersatu berbagai rencana kerja yang ada;
2. Merumuskan dan memperlihatkan apa yang ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi selama satu tahun serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Rencana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ini dibagi kedalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Tahun lalu, dan perkiraan capaian tahun berjalan., mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja BPSDM sudah disahkan Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

C. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

D. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

E. BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

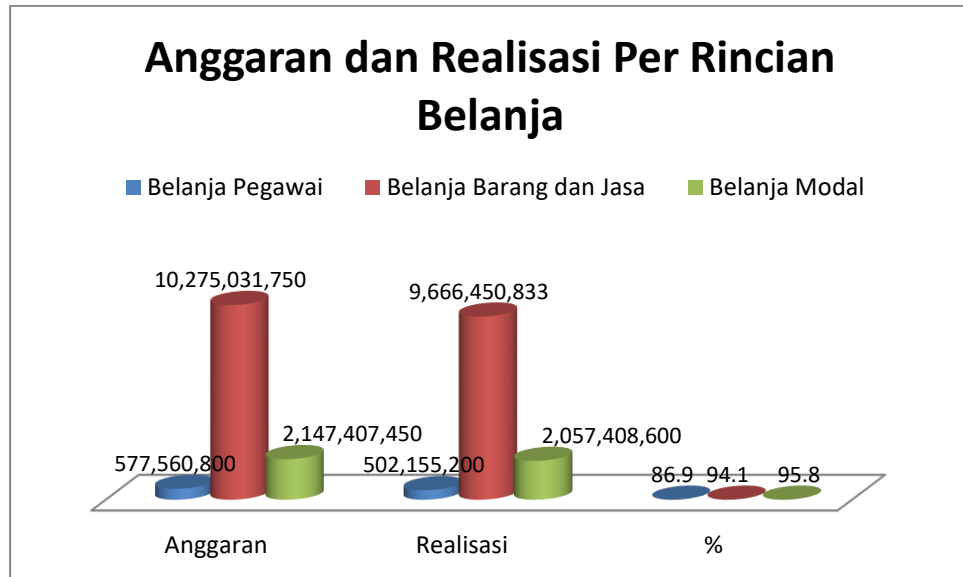
Aparatur Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya mampu menunjukkan kinerja optimalnya. hal ini ditandai dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja aparatur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tuntutan peningkatan kesejahteraan masih terus dirasakan dan didengarkan. Dalam memenuhi tuntutan ini, pemerintah terus

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, produktif, transparan, bebas KKN dan netral yang pada gilirannya dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, yaitu aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kesejahteraan kepada semua pihak tanpa membedakan asal usul ataupun dari partai politik tertentu

Pada tahun 2018 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018 pelaksanaan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang ditunjang dengan APBD murni untuk belanja langsung sebesar Rp. 13.000.000.000 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 577.560.800,-, Belanja barang dan Jasa semula sebesar Rp.10.439.031.750,- berubah menjadi Rp. 10.275.031.750,- dan Belanja modal semula sebesar Rp. 1.983.407.450,- berubah menjadi Rp. 2.147.407.450,-.

Realisasi dari masing-masing belanja meliputi belanja pegawai Rp. 502.155.200,-, belanja barang dan jasa Rp. 9.666.450.833,- dan belanja modal Rp. 2.057.408.600,- sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Penjabaran dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

**Tabel 1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2018**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.053.514.250	2.994.045.599	94,90	160.968.691
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.325.500	96,12	174.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	889.124.000	870.637.728	97,92	18.486.272
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	400.000.000	399.499.998	99,87	500.002
Penyediaan Alat Tulis Kantor	158.209.800	156.948.550	99,20	1.268.250
Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.592.000	55.154.700	77,04	16.437.300

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.055.000	89.757.800	99,67	297.200
Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip	301.750.000	265.179.900	87,88	36.570.100
Penyediaan Makanan dan Minuman	159.522.650	117.887.378	73,90	41.635.272
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	226.860.800	181.361.700	79,94	45.499.100
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	650.000.000	649.988.305	100	11.695
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	203.400.000	203.304.000	99,95	96.000

**Tabel 2. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2018**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.123.419.150	2.977.567.322	95.33	145.851.828
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	177.560.000	176.760.000	99,55	800.000
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	358.032.500	336.441.680	93,97	21.590.820
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	573.397.450	515.499.220	89,89	57.948.230
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	365.000.000	364.730.000	99,93	270.000
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor	392.670.000	363.859.000	92,66	28.811.000
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	907.000.000	894.981.000	98,67	12.019.000
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	102.000.000	101.400.000	99,41	600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	247.759.200	223.946.422	90,39	23.812.778

Tabel 3. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Peningkatan Disiplin Aparatur
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2018

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45.600.000	44.536.800	97,67	1.063.200
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45.600.000	44.536.800	97,67	1.063.200

Tabel 4. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Internal) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi per 31 Desember 2018

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Internal)	380.905.000	320.213.000	84,07	60.692.000
Kegiatan Bimtek/ Diklat aparatur internal	380.905.000	320.213.000	84,07	60.692.000

Tabel 5. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi per 31 Desember 2018

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47.500.000	47.500.000	45.908.000	1.592.000
Kegiatan penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD	47.500.000	47.500.000	45.908.000	1.592.000

**Tabel 6. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan
Manajemen Pelayanan Kediklatan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2018**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Manajemen Pelayanan Kediklatan	318.213.000	293.470.928	92,22	24.742.072
Kegiatan Rapat Koordinasi Kediklatan	165.313.000	140.799.227	85,17	24.513.773
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan	152.900.000	152.671.701	99,85	228.299

**Tabel 7. Daftar Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
per 31 Desember 2018**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.929.348.600	5.618.088.414	94,75	311.260.186
Kegiatan Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan	1.023.481.000	981.206.432	95,87	42.274.568
Kegiatan pengembangan Kompetensi teknis inti	1.059.403.600	1.027.716.725	97,01	31.686.875
Kegiatan	1.445.507.000	1.368.762.719	94,69	76.744.281

pengembangan kompetensi Teknis umum dan fungsional				
Kegiatan pengembangan Sertifikasi kompetensi manajerial	2.400.957.000	2.240.402.538	93,31	160.554.462

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian anggaran serta permasalahan yang dihadapi dari masing-masing kegiatan dan output yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, sampai dengan akhir Tahun 2018.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.155.014.250 atau sama dengan 24% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 13.000.000.00. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000 atau sama dengan 0,14% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran. Dari anggaran jasa surat menyurat dapat direalisasikan sebesar Rp 4.325.000 atau sama dengan 96,11% Yaitu antara lain digunakan untuk belanja Materai dan pengiriman surat-surat dinas yang sifatnya harus menggunakan jasa pengiriman surat.
- b. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dianggarkan sebesar Rp. 889.124.000 atau sama dengan 28,18%. Dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 889.124.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 870.637.726 atau sama dengan 97,92% yaitu untuk pembiayaan 2 rekening telephone, 1 Rekening Air dan 26 Rekening Listrik termasuk didalamnya biaya berlangganan TV kabel.
- c. Belanja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 400.000.000 atau sama dengan 12,68% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 400.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 399.499.998 atau sama dengan 99,87% yaitu digunakan untuk belanja jasa cleaning servis gedung kantor dan belanja jasa pembersihan dan perawatan halaman/taman.

- d. Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 158.209.800 atau sama dengan 5,01% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 158.209.800 dapat direalisasikan sebesar Rp 156.948.550 atau sama dengan 99,20% yaitu untuk pembelian alat tulis kantor seperti kertas, kwitansi, name tag pegawai dan lain-lain sebagaimana terlampir.
- A. Belanja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 71.592.000 atau sama dengan 2,27% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 71.592.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 55.154.700 atau sama dengan 77,04% yaitu digunakan untuk belanja cetak seperti Kop surat, amplop, map, dll serta untuk belanja penggandaan, cetak jurnal ilmiah untuk widya iswara tidak terealisasi mengingat jurnal ilmiah pada tahun ini tidak diterbitkan.
- e. Belanja Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor Rp. 90.055.000 atau sama dengan 2,85% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 90.055.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 89.757.800 atau sama dengan 99,67 % antara lain digunakan untuk belanja alat-alat listrik atau penerangan gedung kantor (terlampir).
- f. Belanja Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor sebesar Rp. 203.400.000 atau sama dengan 6,45% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 203.400.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 203.304.000 atau sama dengan 99,95% antara lain digunakan untuk belanja surat kabar/majalah dan belanja modal aset tetap lainnya seperti belanja buku perpustakaan.
- g. Belanja Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 159.522.650 atau sama dengan 5,06% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 159.522.650 dapat direalisasikan sebesar Rp 117.887.378 atau sama dengan 73,90% diantaranya digunakan untuk belanja makan dan minum untuk acara rapat kantor serta belanja makan dan minum untuk tamu. Kendala dari penyerapan tidak mencapai target direalisasikan dimana penyediaan makan minum tamu disesuaikan dengan tamu yang berkunjung dan berkoordinasi dengan Kepala BPSDM
- h. Belanja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/teknis perkantoran, dianggarkan sebesar Rp. 226.860.800 atau sama dengan 7,19 % dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 226.860.800 dapat direalisasikan sebesar Rp 181.361.700 atau sama dengan 79,94% yaitu antara lain digunakan untuk pembayaran Honorarium panitia

pelaksana kegiatan dan honorarium lainnya, honorarium Tim Penilai Daerah Angka Kredit Provinsi Jambi dan Tim Buletin Jurnal tidak direalisasikan dikarenakan Surat Keputusan Gubernur mengenai penetapan belum disesuaikan dengan perubahan nomenklatur dari Badan Diklat Daerah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia..

- i. Belanja Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 650.000.000 atau sama dengan 20,60% dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 650.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 649.988.305 atau sama dengan 100% yaitu digunakan untuk belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan juga belanja Perjalanan dinas luar daerah.
- j. Belanja Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip, dianggarkan sebesar Rp. 301.750.000 atau sama dengan 3,28 % dari total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, dari anggaran Rp. 301.750.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 265.179.000 atau sama 87,88 % yaitu untuk pembelanjaan penyediaan bahan bakar mesin genset sebanyak 2 (dua) unit dan alat kebutuhan rumah tangga kantor antara lain sebagaimana yang tercantum pada daftar realisasi pencapaian kegiatan/sub kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.123.419.150 atau sama dengan 24,03% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 13.000.000.000 Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 177.560.000 atau sama dengan 5,68% dari total anggaran program peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 177.560.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 176.760.000 atau sama dengan 99,55% Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, Pembelanjaan pengadaan bangunan gedung kantor, Pembangunan tempat parkir mobil/canopy dan sebagainya (Terlampir).
- b. Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 358.032.500 atau sama dengan 11,46% dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 336.441.680 dapat direalisasikan sebesar Rp 358.032.500 atau sama dengan 93,97% Yaitu digunakan antara lain untuk

pembelanjaan pengadaan alat kantor, Pengadaan alat rumah tangga kantor, Pengadaan alat pendingin, Pengadaan peralatan visual studio dan pengadaan peralatan lainnya (terlampir).

- c. Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung sebesar Rp. 573.397.450 atau sama dengan 18,36% dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 573.397.450 dapat direalisasikan sebesar Rp 515.449.220 atau sama dengan 89,89 % Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan peralatan kantor seperti belanja labelisasi aset BPSDM, umbul-umbul, Bendera merah putih uk. besar, Taplak meja serta Perlengkapan untuk kamar Mes BPSDM.
- d. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 365.000.000 atau sama dengan 11,69% dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 365.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 364.730.000 atau sama dengan 99,93% Yaitu Pembelanjaan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan serta Pembiayaan Honorarium petugas keamanan/satpam kantor BPSDM.
- e. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp. 392.670.000 atau sama dengan 12,57% dari dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 392.670.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 363.859.000 atau sama dengan 92,66% terealisasi, Yaitu digunakan untuk Pembiayaan petugas sound system dan elektronik lainnya, Petugas penjaga asrama/barak serta Pembelanjaan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor.
- f. Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor sebesar Rp.907.000.000 atau sama dengan 29,03% dari dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 907.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 894.981.000 atau sama dengan 98,67%, Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan perencanaan dan pengawasan diantaranya Rehab rumah dinas, rehab ruang Arsip Kantor BPSDM, rehab ruang belajar 1 serta rehab saluran drainase kantor BPSDM.
- g. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas sebesar Rp. 247.759.200 atau sama dengan 7,93% dari dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 247.759.200 dapat direalisasikan sebesar Rp 223.946.422 atau sama dengan 90,39% Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan Honorarium petugas supir, Pembelanjaan

Jasa servis Kendaraan roda empat dan roda dua serta Pembiayaan atas Pajak Kendaraan bermotor kantor.

- h. Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 102.000.000 atau sama dengan 3,27% dari total anggaran peningkatan sarana prasarana aparatur, dari anggaran Rp. 102.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 101.400.000 atau sama dengan 99,41% Yaitu digunakan untuk Pembelian peralatan Pemasangan Instalasi listrik kantor BPSDM.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 45.600.000 atau sama dengan 0,35% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 13.000.000.000 Dari anggaran peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 45.600.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 44.536.800 atau sama dengan 97,67% dapat terealisasi, Yaitu digunakan untuk Pembelian pakaian dinas harian pegawai BPSDM dan Pakaian seragam satpam beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Internal)

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 380.905.000 atau sama dengan 2,93% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 13.000.000.000. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar Rp. 380.905.000 atau sama dengan 2,93 % dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari anggaran Rp. 380.905.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 320.312.000 atau sama dengan 84,07 % yaitu untuk pembelian setoran kontribusi dan belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Aparatur BPSDM.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 47.500.000 atau sama dengan 0,37% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 13.000.000.000. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD sebesar Rp. 47.500.000 atau sama dengan 0,37 % dari total anggaran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dari anggaran Rp. 47.500.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 45.908.000 atau sama dengan 96,65 % yaitu untuk pembelanjaan honorarium Operator LPPK/Tepra, belanja penyusunan profil lembaga, belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja makan minum rapat.

6. Program Manajemen Pelayanan Kediklatan

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 318.213.000 atau sama dengan 2,45% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 13.000.000.000. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kediklatan sebesar Rp. 165.313.000 atau sama dengan 51,95% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari anggaran Rp. 165.313.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 135.504.227 atau sama dengan 81,97%, yaitu diantaranya digunakan untuk Pembelanjaan pengadaan materi kit, naskah paparan dan hasil, Pembiayaan Honorarium Narasumber dan Moderator, Pembiayaan Dokumentasi/Publikasi serta Pembiayaan makan dan minum peserta rapat, Narasumber dan tamu pusat.
- b. Belanja Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat sebesar Rp. 152.900.000 atau sama dengan 48,05% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dari anggaran Rp. 152.900.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 152.671.701 atau sama dengan 99,85% Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan pengiriman dokumen, Pengadaan Instrumen IKD dan laporan hasil monev, Pembelanjaan akomodasi dan konsumsi rapat serta Pembelanjaan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.

7. Program Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.929.348.600 atau sama dengan 45,61% dari total anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 13.000.000.000. Adapun rincian penggunaan anggaran program tersebut adalah melalui belanja kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi dan pengelolaan kelembagaan bagi PNS Daerah sebesar Rp 1.023.481.000 atau sama dengan 17,26% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari anggaran Rp. 1.023.481.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 981.206.432 atau sama dengan 95,87%, Yaitu digunakan untuk Pembelanjaan honorarium lembur pegawai, Pembelanjaan bahan habis pakai, Pembelanjaan Dokumentasi/Publikasi, Akomodasi dan Konsumsi Diklat BPSDM.

Target kinerja untuk program dan kegiatan ini adalah Persentase peserta lulus uji kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi sebesar 72% tidak dapat direalisasikan dikarenakan Diklat Pimpemdagri tidak jadi dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial sehingga anggaran tersebut direvisi di APBDP.

Persentase capaian indikator kinerja sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 8. Capaian Indikator kinerja sasaran :

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian Indikator
Persentase peserta lulus uji kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi	72%	00%	00%

Untuk capaian realisasi keuangan setelah perubahan sebesar 92,46% dan realisasi fisik 100%, dimana semula ditargetkan Untuk Indikator Kinerja Persentase Peserta Lulus Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Berbasis Kompetensi, digantikan dengan :

- penyeleggaraan pelatihan analisis kebutuhan pengembangan Kompetensi (AKPK) bagi Aparatur Sipil Negara untuk 30 peserta.
- Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri/Kurikulum/Modul Diklat.

- b. Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti sebesar Rp. 1.059.403.600 atau sama dengan 17,87% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari anggaran Rp. 1.059.403.600 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.027.716.725

atau sama dengan 97,01%, Yaitu diantaranya digunakan untuk Pembelanjaan honorarium lembur pegawai, Pembelanjaan bahan habis pakai, Pembelanjaan Dokumentasi/Publikasi, Akomodansi dan Konsumsi Diklat BPSDM. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Inti bagi PNS Daerah dengan target peserta sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) orang aparatur yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- Diklat Teknis Inti Pengelolaan Keuangan Desa dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- Diklat Teknis Inti Kewirausahaan Purnabhakti ASN dengan target peserta sebanyak 30 (tiga Puluh) orang.
- Diklat Teknis Pengelolaan Pasar Tradisional dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- Diklat Teknis Pembina/Pengawas Koperasi dan UKM dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- Diklat Teknis Prosedur Eksport dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- Diklat Teknis Inti Kehumasan dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- Diklat Teknis Inti Dasar-dasar AMDAL dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- Diklat Teknis Inti Pengembangan Pariwisata Daerah dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- Diklat Teknis Inti Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang

- c. Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi teknis umum dan Fungsional bagi PNS sebesar Rp. 1.445.507.000 atau sama dengan 24,38% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari anggaran Rp. 1.445.507.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.368.762.719 atau sama dengan 94,69% Yaitu diantaranya digunakan untuk Pembelanjaan honorarium lembur pegawai , Pembelanjaan bahan habis pakai, Pembelanjaan Dokumentasi/Publikasi, Akomodansi dan Konsumsi Diklat BPSDM. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis umum dan Fungsional bagi PNS Daerah dengan target peserta sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) orang aparatur yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- Bimtek penyusunan DUPAK bagi Widyaiswara target peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang.
 - Workshop penulisan karya tulis ilmiah (KTI) dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - Diklat pengembangan kompetensi arsiparis dilingkungan Pemprov/kab/kota dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - Diklat Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Guru SMA dan SMK dengan target peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang (2 Angkatan).
 - Diklat penyusunan DUPAK bagi Guru SMA/SMK se provinsi Jambi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - Diklat pengembangan kompetensi pustakawan se-Provinsi Jambi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - Diklat Revolusi Mental bagi ASN/ pengembangan kompetensi karakter kebangsaan ASN dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - Diklat pengembangan kompetensi penyuluhan pertanian se-Provinsi Jambi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - Diklat Manajemen Pembangunan bagi ASN se-Provinsi Jambi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga Puluh) orang.
 - Diklat Pengembangan Budaya Organisasi bagi ASN se-Provinsi Jambi dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pad Inspektorat Daerah dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang
- d. Belanja Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial sebesar Rp. 2.400.957.000 atau sama dengan 40,49% dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari anggaran Rp. 2.400.957.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.240.402.538 atau sama dengan 93,31%, Yaitu diantaranya digunakan untuk Pembelanjaan honorarium lembur pegawai , Pembelanjaan bahan habis pakai, Pembelanjaan Dokumentasi/Publikasi, Akomodansi dan Konsumsi Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial bagi PNS Daerah dengan target peserta sejumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) orang aparatur yang terbagi dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- Diklat Kepemimpinan Tk. III dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang
- Diklat Kepemimpinan Tk. IV dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang
- Diklat Kepemimpinan Tk. III Kontribusi dengan target peserta sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang
- Diklat Kepemimpinan Tk. IV Kontribusi dengan target peserta sebanyak 21 (dua puluh satu) orang
- Diklat Komunikasi dan Public speaking dengan target peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang
- Diklat Peningkatan Kapasitas Camat dengan target peserta sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.

Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi tidak tercapainya target kinerja dan realisasi keuangan dengan menata sistem perencanaan dan menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan, dan menganalisis atas capaian kinerja program dan kegiatan sebelumnya.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2019		
					Target Renja OPD Tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN								
4	0 5	0 2	0 1	BIDANG KEPEGAWAIAN							
		PROGRAM: <i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	92,30%	100%	94,81%	94,81%	100%	100%	100%
		<u>Kegiatan 1 :</u> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% kebutuhan benda pos materai, perangkat dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	100%	93,60%	100%	96%	96%	100%	100%	100%
		<u>Kegiatan 2 :</u> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	100%	79%	100%	98%	98%	100%	100%	100%
		<u>Kegiatan 3 :</u> Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				kebersihan kantor									
				<u>Kegiatan 4 :</u> Penyediaan alat tulis Kantor	% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	100%	100%	100%	97%	97%	100%	100%	100%
				<u>Kegiatan 5 :</u> Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100%	98%	100%	77%	77%	100%	100%	100%
				<u>Kegiatan 6 :</u> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				<u>Kegiatan 7 :</u> Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepustakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	100%	95%	100%	74%	74%	100%	0	0
				<u>Kegiatan 8 :</u> Penyediaan Makanan dan Minuman	% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	100%	91%	100%	80%	80%	100%	100%	100%
				<u>Kegiatan 9 :</u> Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			<u>Kegiatan 10 :</u> Pelayanan Pelayanan Administrasi Barang	% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKP	100%	50%	100%	88%	88%	100%	0	0
			<u>Kegiatan 11 :</u> Keikutsertaan Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan Kediklatan Dalam dan Luar Daerah	% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	60 Bln	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
			<u>Kegiatan 12 :</u> Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip	% Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	60 Bln	0%	100%	94,81%	94,81%	100%	100 %	100 %
			<u>Kegiatan 13 :</u> Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	% Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim penjamin mutu SKPD	60 Bln	0%	100%	96%	96%	100%	0	0
			<u>Kegiatan 14 :</u> Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	% Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	60 Bln	0%	100%	98%	98%	100%	100 %	100 %
			<u>Kegiatan 15 :</u> Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja	60 Bln	99%	100%	-	0	100%	0	0
			<i>PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	94%	100%	94,68%	94,68%	100%	100 %	100 %
			<u>Kegiatan 1:</u> Pembangunan Gedung / Sarana kantor	Jumlah Bangunan gedung kantor guna pelaksanaan kinerja	12 Bln	99%	12 Bln	100%	100%	12 Bln	12 Bln	12 Bln

			<u>Kegiatan 2 :</u> Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bln	99%	12 Bln	90%	90%	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			<u>Kegiatan 3:</u> Pengadaan Perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bln	100%	12 Bln	94%	94%	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			<u>Kegiatan 4 :</u> Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang rusak diperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor dibersihkan	12 Bln	96%	12 Bln	100%	100%	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			<u>Kegiatan 5 :</u> Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	12 Bln	100%	12 Bln	90%	90%	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			<u>Kegiatan 6:</u> Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi	12 Bln	97%	12 Bln	97%	97%	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			<u>Kegiatan 7 :</u> Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	12 Bln	68%	12 Bln	92%	92%	12 Bln	12 Bln	12 Bln
			<u>Kegiatan 8 :</u> Penyediaan Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik	Tingkat pemenuhan kebutuhan pemasangan/penggantian jaringan instalasi listrik untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	100 %	100%	100 %	-	0	100 %	100 %	100 %

				<u>Kegiatan 9 :</u> Penyediaan Revitalisasi Jaringan Instalasi Air Bersih	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan air bersih untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	100 %	0%	-	0	-	100 %	100 %	
				<u>Kegiatan 9 :</u> Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Rehab dan Pembangunan Kantor	Jumlah dan jenis Jasa yang dibutuhkan guna pelaksanaan rehab dan pembangunan gedung kantor	100 %	0%	-	0	100 %	0	0	
				<u>Kegiatan 10 :</u> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	100 %	94%	100 %	-	0	100 %	0	
				PROGRAM: Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	100%	96%	100%	-	0	100%	100%	100%
				<u>Kegiatan 1 :</u> Pengadaan Pakaian Dinas	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	105 Org	96%	-	0	105 Org	105 Org	105 Org	
				<u>Kegiatan 2 :</u> Pengadaan Pakaian Tradisional Melayu Jambi	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	105 Org	0%	-	0	105 Org	105 Org	105 Org	
				<u>Kegiatan 3 :</u> Pengadaan pakaian batik Jambi	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	105 Org	0%	-	0	105 Org	105 Org	105 Org	

			PROGRAM: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Internal	-	99,18%	100 %	-	0	100 %	-	-
			Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal	Terlatihnya Aparatur Internal	-	99%	25 Org	-	0	25 Org	-	-
			Kegiatan 2 : Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Berfungsinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Aparatur	-	-	1 Lbg	-	0	1 Lbg	-	-
			PROGRAM : Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	-		100 %	96,65%	96,65%	100 %		
			Kegiatan 1 : Penyusunan Renstra, Renja dan Capaian Kinerja	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	-	-	3 Dkm	96,65%	96,65%	3 Dkm		
			PROGRAM : Manajemen Pelayanan Kediklatan	Persentase Keterlaksanaan Penyelenggaraan Diklat	100 %	89,52%	100%	92,22%	92,22%	100%	100 %	100 %
			Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal	Terlatihnya Aparatur Internal	135 Org	-	25 Org	84,07%	84,07%	25 Org	25 Org	25 Org
			Kegiatan 2 : Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Berfungsinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Aparatur	1 Lbg	-	1 Lbg	-	-	1 Lbg	1 Lbg	1 Lbg

				Kegiatan 3 : Penyusunan Renstra, Renja dan Capaian Kinerja	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	3 Dkm	-	3 Dkm	96,65%	96,65%	3 Dkm	3 Dkm	3 Dkm
				Kegiatan 4 : Penyelenggaraan Rakor Kediklatan	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	10 kali	84%	2 kali	85%	85%	2 kali	2 kali	2 kali
				Kegiatan 5 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	6 Bidang	98%	6 Bidang	100%	100%	6 Bidang	6 Bidang	6 Bidang
				Kegiatan 6 : Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	400 Exmp	0%	400 Exmp			400 Exmp	-	-
				PROGRAM: Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	100 %	91,09%	97 %	92,4	92,4	97 %	-	-
				Kegiatan 1 : Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Lembaga	Terlaksananya Uji Kompetensi dan Sertifikasi Berbasis Kompetensi	1.240 org	106	230 orang	140	60,87	230 orang	-	-
				Kegiatan 2 : Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Aparatur	1.520 Org	236	290 Org	270	93,10	290 Org	-	-
				Kegiatan 3 : Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	3.240 Org	270	690 Org	310	44,93	690 Org	-	-
				Kegiatan 4 : Pengembangan Kompetensi Manajerial	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial Aparatur	4.188 Org	220	250 Org	204	81,6	250 Org	-	-

			PROGRAM: Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus	75%	-	-	-	-	-	72%	72%
			Kegiatan 1 : Fokus Group Discussion LSP-PDN		-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 : Studi Tiru LSP-PDN		-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 : TOT Pempindagri		-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 4 : Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 5 : Pelaksanaan Akreditasi Lembaga		-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 6 : Diklat Analisis Kebutuhan Sistem Informasi bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (AKSI OPD)		-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 7 : Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetens		-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 8: Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri/Kurikulum/Silabi/M odul		-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 9 : Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan		-	-	-	-	-	-	-	-

			PElatihan									
			Kegiatan 10 : Sertifikasi Kompetensi		203 Org	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 11 : Pengelolaan dan tenaga pengembangan Kompetensi		203 Org	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 12 : Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama		203 Org	-	-	-	-	-	-	-
			PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	100 %	-	-	-	-	-	97 %	97 %
			Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan		133 org	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 13 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib non pelayanan dasar		133 org	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 14 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm perangkat daerah penunjang		133 org	-	-	-	-	-	-	-
			PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	100 %	-	-	-	-	-	97 %	97 %
			Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi umum jabatan			-	-	-	-	-		

			administrasi									
			Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi pilihan jabatan administrasi			-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 13 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional			-	-	-	-	-	-	-
			PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Manajerial	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik		-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 10 : Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah		217 Org	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural		217 Org	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan		217 Org	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang penunjang, dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjalankan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja pelayanan BPSDM tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja Kunci dari Kementerian.

Tabel 10. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi

No	Indikator	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2018 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	Tahun 2018 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	98 %	99 %	100 %	91 %	92 %	
2	Persentase Peserta <i>Lulus Uji Kompetensi</i>	72 %	73 %	74 %	0 %			
3	Masyarakat / Peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat	82 %	83 %	84 %	100 %	81 %	82 %	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPSDM

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral Pembangunan Nasional. selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektor nasional di daerah. juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah sekaligus dengan tujuan pencapaian sasaran sektoral nasional di daerah. serta tujuan pengintegrasian pembangunan antar sektor di dalam satu wilayah.

Desentralisasi secara tegas memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan kata lain. porsi daerah untuk menentukan berbagai kebijakan publik sesuai dengan konteks daerahnya menjadi semakin besar. Pada saat yang sama. dinamika sosial. politik dan ekonomi dalam skala lokal maupun nasional. akan terus berubah. Demikian pula dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta para stakeholders lainnya yang juga terus berubah dan harus direspon oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan publik di Provinsi Jambi dewasa ini menjadi isu dan sekaligus merupakan gambaran masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintah yang memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejalan dengan diterbitkannya dan diberlakukannya berbagai regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. maka perbaikan kinerja pelayanan aparatur yang berkelanjutan perlu terus ditingkatkan sehingga akan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen pemerintahan yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Selain itu. perbaikan kinerja pelayanan bidang aparatur juga akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan (*trust*). dan legitimasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sehingga mampu memberikan daya dukung peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa peningkatan kualitas pelayanan khususnya pelayanan aparatur yang berkualitas merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan paradigma

dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Gubernur. memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. sebagaimana yang sebelum tahun 2017 diatur pada Peraturan Gubernur Jambi. nomor 31 Tahun 2008. dengan nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan pelatihan.

Untuk tahun 2017 sejalan dengan pergantian nomenklatur menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. atau disebut BPSDM Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPSDM Provinsi dalam melaksanakan tugas. menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis. rencana. dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan. evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Isu belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan permasalahan yang dihadapi Pemerintah di Provinsi Jambi. Hal ini tercermin dari perolehan *Nilai SAKIP* Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan Kementerian PAN & RB. dapat juga dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat

dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah. tingkat profesionalitas aparaturnya pemerintah daerah. kemampuan penegakan hukum dan peraturan. kapasitas pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah. transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik.

Sedangkan permasalahan yang berhasil diidentifikasi melalui musrenbang / rapat koordinasi pada urusan pembangunan secara umum khususnya untuk bidang Aparatur yang merupakan domain Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi terdapat beberapa permasalahan. diantaranya; 1) belum optimalnya pembinaan dan pengembangan aparaturnya. 2) kapasitas sumberdaya aparaturnya yang perlu terus ditingkatkan. 3) rendahnya kesejahteraan pegawai. 4) belum optimalnya kinerja aparaturnya baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. kecamatan dan kelurahan/desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2019 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan yang signifikan pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan pada BPSDM Provinsi Jambi. Namun, tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih dapat mengalami perubahan karena pertimbangan program dan kegiatan prioritas serta hasil capaian pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi PD. Perbedaan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 11. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 BPSDM PROVINSI JAMBI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
1	<u>PROGRAM:</u> Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov. Jambi	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.922.085	<u>PROGRAM:</u> Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov. Jambi	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.922.085	
2	<u>Kegiatan 1 :</u> Penyediaan Jasa Surat Menyurat		% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	100%	5.000	<u>Kegiatan 1 :</u> Penyediaan Jasa Surat Menyurat		% kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	100%	5.000	
3	<u>Kegiatan 2 :</u> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	100%	1.302.000	<u>Kegiatan 2 :</u> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		% kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	100%	1.302.000	
4	<u>Kegiatan 3 :</u> Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	100%	400.000	<u>Kegiatan 3 :</u> Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		% Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor	100%	400.000	

5	Kegiatan 4 : Penyediaan alat tulis Kantor		% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	100%	89.905	Kegiatan 4 : Penyediaan alat tulis Kantor		% Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	100%	89.905	
6	Kegiatan 5 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100%	60.000	Kegiatan 5 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		% Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100%	60.000	
7	Kegiatan 6 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100%	72.640	Kegiatan 6 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		% Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	100%	72.640	
8	Kegiatan 7 : Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepastakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	100%	0	Kegiatan 7 : Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		% Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepastakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	100%	0	
9	Kegiatan 8 : Penyediaan Makanan dan Minuman		% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna	100%	85.665	Kegiatan 8 : Penyediaan Makanan dan Minuman		% Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna	100%	85.665	

			mendukung kelancaran tugas					mendukung kelancaran tugas			
10	Kegiatan 9 : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	100%	229.84 1	Kegiatan 9 : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	100%	229.84 1	
11	Kegiatan 10 : Pelayanan Pelayanan Administrasi Barang		% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKP	100%	0	Kegiatan 10 : Pelayanan Pelayanan Administrasi Barang		% Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKP	100%	0	
12	Kegiatan 11 : Keikutsertaan Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi/Pe mbinaan Kediklatan Dalam dan Luar Daerah		% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	60 Bln	400.00 0	Kegiatan 11 : Keikutsertaan Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi/Pe mbinaan Kediklatan Dalam dan Luar Daerah		% Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	60 Bln	400.00 0	
13	Kegiatan 12 : Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip		% Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	60 Bln	73.634	Kegiatan 12 : Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip		% Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	60 Bln	73.634	
14	Kegiatan 13 : Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		% Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim	60 Bln	0	Kegiatan 13 : Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		% Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit, Tim	60 Bln	0	

			penjamin mutu SKPD					penjamin mutu SKPD			
15	Kegiatan 14 : Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor		% Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	60 Bln	203.40 0	Kegiatan 14 : Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor		% Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	60 Bln	203.40 0	
16	Kegiatan 15 : Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja	60 Bln	0	Kegiatan 15 : Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		% Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja	60 Bln	0	
17	PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	2.437.0 82	PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	2.437.0 82	
18	Kegiatan 1: Pembangunan Gedung / Sarana kantor		Jumlah Bangunan gedung kantor guna pelaksanaan kinerja	12 Bln	187.00 0	Kegiatan 1: Pembangunan Gedung / Sarana kantor		Jumlah Bangunan gedung kantor guna pelaksanaan kinerja	12 Bln	187.00 0	
19	Kegiatan 2 : Pengadaan Peralatan Gedung kantor		Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bln	153.73 2	Kegiatan 2 : Pengadaan Peralatan Gedung kantor		Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	12 Bln	153.73 2	
20	Kegiatan 3: Pengadaan Perlengkapan kantor		Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bln	481.40 0	Kegiatan 3: Pengadaan Perlengkapan kantor		Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bln	481.40 0	
21	Kegiatan 4 :		Jumlah bagian	12 Bln	200.00	Kegiatan 4 :		Jumlah bagian	12 Bln	200.00	

	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		gedung kantor yang rusak diperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor dibersihkan		0	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		gedung kantor yang rusak diperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor dibersihkan		0
22	<u>Kegiatan 5 :</u> Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor		Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	12 Bln	259.45 0	<u>Kegiatan 5 :</u> Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor		Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	12 Bln	259.45 0
23	<u>Kegiatan 6:</u> Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi	12 Bln	550.00 0	<u>Kegiatan 6:</u> Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi	12 Bln	550.00 0
24	<u>Kegiatan 7 :</u> Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	12 Bln	205.50 0	<u>Kegiatan 7 :</u> Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	12 Bln	205.50 0
25	<u>Kegiatan 8 :</u> Penyediaan Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik		Tingkat pemenuhan kebutuhan pemasangan/penggantian jaringan instalasi	100 %	200.00 0	<u>Kegiatan 8 :</u> Penyediaan Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik		Tingkat pemenuhan kebutuhan pemasangan/penggantian jaringan instalasi	100 %	200.00 0

			listrik untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama					listrik untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama			
26	<u>Kegiatan 9 :</u> Penyediaan Revitalisasi Jaringan Instalasi Air Bersih		Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan air bersih untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	100 %	200.000	<u>Kegiatan 9 :</u> Penyediaan Revitalisasi Jaringan Instalasi Air Bersih		Tingkat pemenuhan kebutuhan pengelolaan air bersih untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	100 %	200.000	
27	<u>Kegiatan 9 :</u> Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Rehab dan Pembangunan Kantor		Jumlah dan jenis Jasa yang dibutuhkan guna pelaksanaan rehab dan pembangunan gedung kantor	100 %	-	<u>Kegiatan 9 :</u> Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Rehab dan Pembangunan Kantor		Jumlah dan jenis Jasa yang dibutuhkan guna pelaksanaan rehab dan pembangunan gedung kantor	100 %	-	
28	<u>Kegiatan 10 :</u> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	100 %	-	<u>Kegiatan 10 :</u> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	100 %	-	
29	<u>PROGRAM:</u> <u>Peningkatan Disiplin Aparatur</u>		Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	100%	78.000	<u>PROGRAM:</u> <u>Peningkatan Disiplin Aparatur</u>		Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	100%	78.000	
30	<u>Kegiatan 1 :</u> Pengadaan Pakaian Dinas		Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin	105 Org	78.000	<u>Kegiatan 1 :</u> Pengadaan Pakaian Dinas		Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin	105 Org	78.000	

			berpakaian pegawai					berpakaian pegawai			
31	Kegiatan 2 : Pengadaan Pakaian Tradisional Melayu Jambi		Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	105 Org	-	Kegiatan 2 : Pengadaan Pakaian Tradisional Melayu Jambi		Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	105 Org	-	
32	Kegiatan 3 : Pengadaan pakaian batik Jambi		Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	105 Org	-	Kegiatan 3 : Pengadaan pakaian batik Jambi		Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	105 Org	-	
33	PROGRAM: <i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>		Persentase Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Internal	-	-	PROGRAM: <i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>		Persentase Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Internal	-	-	
34	Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal		Terlatihnya Aparatur Internal	-	-	Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal		Terlatihnya Aparatur Internal	-	-	
35	Kegiatan 2 : Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		Berfungsinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Aparatur	-	-	Kegiatan 2 : Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		Berfungsinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Aparatur	-	-	
36	PROGRAM : <i>Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan</i>		Persentase Ketersediaan Dokumen	-	-	PROGRAM : <i>Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan</i>		Persentase Ketersediaan Dokumen	-	-	

			Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan					Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan			
37	<u>Kegiatan 1</u> : Penyusunan Renstra, Renja dan Capaian Kinerja		Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	-	-	<u>Kegiatan 1</u> : Penyusunan Renstra, Renja dan Capaian Kinerja		Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	-	-	
38	PROGRAM : <i>Manajemen Pelayanan Kediklatan</i>		Persentase Keterlaksanaan Penyelenggaraan Diklat	100 %	819.55 8	PROGRAM : <i>Manajemen Pelayanan Kediklatan</i>		Persentase Keterlaksanaan Penyelenggaraan Diklat	100 %	819.55 8	
39	Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal		Terlatihnya Aparatur Internal	135 Org	320.81 5	Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal		Terlatihnya Aparatur Internal	135 Org	320.81 5	
40	Kegiatan 2 : Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		Berfungsinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Aparatur	1 Lbg	0	Kegiatan 2 : Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		Berfungsinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Aparatur	1 Lbg	0	
41	<u>Kegiatan 3</u> : Penyusunan Renstra, Renja dan Capaian Kinerja		Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	3 Dkm	139.45 0	<u>Kegiatan 3</u> : Penyusunan Renstra, Renja dan Capaian Kinerja		Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan, dan Pelaporan Keuangan	3 Dkm	139.45 0	

42	Kegiatan 4 : Penyelenggaraan Rakor Kediklatan		Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	10 kali	155.51 3	Kegiatan 4 : Penyelenggaraan Rakor Kediklatan		Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	10 kali	155.51 3	
43	Kegiatan 5 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan		Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	6 Bidan g	121.82 1	Kegiatan 5 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kediklatan		Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	6 Bidan g	121.82 1	
44	Kegiatan 6 : Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan		Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jur nal Ilmiah Kediklatan	400 Exmp	0	Kegiatan 6 : Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan		Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jur nal Ilmiah Kediklatan	400 Exmp	0	
45	PROGRAM: Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	-	-	PROGRAM: Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	-	-	
46	Kegiatan 1 : Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Lembaga		Terlaksananya Uji Kompetensi dan Sertifikasi Berbasis Kompetensi	-	-	Kegiatan 1 : Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Lembaga		Terlaksananya Uji Kompetensi dan Sertifikasi Berbasis Kompetensi	-	-	
47	Kegiatan 2 : Pengembangan Kompetensi Teknis Inti		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Aparatur	-	-	Kegiatan 2 : Pengembangan Kompetensi Teknis Inti		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Aparatur	-	-	
48	Kegiatan 3 : Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	-	-	Kegiatan 3 : Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	-	-	
49	Kegiatan 4 : Pengembangan		Terlaksananya Pengembangan	-	-	Kegiatan 4 : Pengembangan		Terlaksananya Pengembangan	-	-	

	Kompetensi Manajerial		Kompetensi Manajerial Aparatur			Kompetensi Manajerial		Kompetensi Manajerial Aparatur			
50	PROGRAM: Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan		Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus	75%	1.198.361	PROGRAM: Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan		Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus	75%	1.198.361	
51	Kegiatan 1 : Fokus Group Discussion LSP-PDN			-	53.940	Kegiatan 1 : Fokus Group Discussion LSP-PDN			-	53.940	
52	Kegiatan 2 : Studi Tiru LSP-PDN			-	70.175	Kegiatan 2 : Studi Tiru LSP-PDN			-	70.175	
53	Kegiatan 3 : TOT Pempimdagri			-	112.330	Kegiatan 3 : TOT Pempimdagri			-	112.330	
54	Kegiatan 4 : Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kabupaten/kota			-	149.910	Kegiatan 4 : Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kabupaten/kota			-	149.910	
55	Kegiatan 5 : Pelaksanaan Akreditasi Lembaga			-	294.825	Kegiatan 5 : Pelaksanaan Akreditasi Lembaga			-	294.825	
56	Kegiatan 6 : Diklat Analisis Kebutuhan Sistem Informasi bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (AKSI OPD)			-	259.500	Kegiatan 6 : Diklat Analisis Kebutuhan Sistem Informasi bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (AKSI OPD)			-	259.500	
57	Kegiatan 7 : Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi			-	71.275	Kegiatan 7 : Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi			-	71.275	
58	Kegiatan 8: Penyusunan Perangkat			-	119.675	Kegiatan 8: Penyusunan Perangkat			-	119.675	

	Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri/Kurikulum/Silabi/Modul					Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri/Kurikulum/Silabi/Modul					
59	Kegiatan 9 : Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan PELatihan			-	66.730	Kegiatan 9 : Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan PELatihan			-	66.730	
60	Kegiatan 10 : Sertifikasi Kompetensi			-	-	Kegiatan 10 : Sertifikasi Kompetensi			-	-	
61	Kegiatan 11 : Pengelolaan dan tenaga pengembangan Kompetensi			-	-	Kegiatan 11 : Pengelolaan dan tenaga pengembangan Kompetensi			-	-	
62	Kegiatan 12 : Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama			-	-	Kegiatan 12 : Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama			-	-	
63	PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Teknis Inti		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	1.300.200	PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Teknis Inti		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	1.300.200	
64	Kegiatan 1 : Diklat Teknis Inti pengelolaan Keuangan Desa		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		86.550	Kegiatan 1 : Diklat Teknis Inti pengelolaan Keuangan Desa		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		86.550	
65	Kegiatan 2 : Diklat Kewirausahaan purna bhakti bagi ASN		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		301.255	Kegiatan 2 : Diklat Kewirausahaan purna bhakti bagi ASN		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		301.255	
66	Kegiatan 3 : Diklat Pengembangan Pariwisata		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		320.155	Kegiatan 3 : Diklat Pengembangan Pariwisata		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		320.155	

67	Kegiatan 4 : Diklat Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		89.550	Kegiatan 4 : Diklat Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		89.550	
68	Kegiatan 5 : Diklat Perencanaan Penggangan		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		86.550	Kegiatan 5 : Diklat Perencanaan Penggangan		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		86.550	
69	Kegiatan 6 : Pendataan kebutuhan pengembangan kompetensi Teknis Inti		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		15.835	Kegiatan 6 : Pendataan kebutuhan pengembangan kompetensi Teknis Inti		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		15.835	
70	Kegiatan 7 : Diklat Pengelolaan Aset daerah				86.550	Kegiatan 7 : Diklat Pengelolaan Aset daerah				86.550	
71	Kegiatan 8 : Diklat Kearsipan				78.438	Kegiatan 8 : Diklat Kearsipan				78.438	
72	Kegiatan 9 : Diklat Teknis Pemandu Wisata				78.438	Kegiatan 9 : Diklat Teknis Pemandu Wisata				78.438	
73	Kegiatan 10 : Diklat Teknis Sanitasi Lingkungan				78.438	Kegiatan 10 : Diklat Teknis Sanitasi Lingkungan				78.438	
74	Kegiatan 11 : Diklat Teknis Penilaian Koperasi				78.438	Kegiatan 11 : Diklat Teknis Penilaian Koperasi				78.438	
75	Kegiatan 12 :					Kegiatan 12 :					

	Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan					Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan					
76	Kegiatan 13 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib non pelayanan dasar					Kegiatan 13 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib non pelayanan dasar					
77	Kegiatan 14 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm perangkat daerah penunjang					Kegiatan 14 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm perangkat daerah penunjang					
78	PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	1.487.594	PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	1.487.594	
79	Kegiatan 1 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pengelola Perpustakaan bagi Guru SLTA		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		338.175	Kegiatan 1 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pengelola Perpustakaan bagi Guru SLTA		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		338.175	
80	Kegiatan 2 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Penyuluh		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		360.935	Kegiatan 2 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		360.935	

	Pertanian									
81	Kegiatan 3 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Revolusi Mental bagi Pejabat Eselon IV		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		95.375	Kegiatan 3 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Revolusi Mental bagi Pejabat Eselon IV		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		95.375
82	Kegiatan 4 : Pelatihan KTI bagi Guru SMA dan SMK		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		105.450	Kegiatan 4 : Pelatihan KTI bagi Guru SMA dan SMK		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		105.450
83	Kegiatan 5 : Pelatihan Penyusunan DUPAK bagi Guru SMA dan SMK		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		104.950	Kegiatan 5 : Pelatihan Penyusunan DUPAK bagi Guru SMA dan SMK		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		104.950
84	Kegiatan 6 : Pelatihan Pengembangan Budaya Organisasi/Budaya lokal		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		95.375	Kegiatan 6 : Pelatihan Pengembangan Budaya Organisasi/Budaya lokal		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		95.375
85	Kegiatan 7 : Pelatihan Analisis Jabatan bagi ASN Provinsi/Kabupaten/Kota		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		99.725	Kegiatan 7 : Pelatihan Analisis Jabatan bagi ASN Provinsi/Kabupaten/Kota		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		99.725
86	Kegiatan 8 : Pelatihan Pengembangan Perkotaan berbasis tata ruang dan ekosistem bagi ASN		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		101.250	Kegiatan 8 : Pelatihan Pengembangan Perkotaan berbasis tata ruang dan ekosistem bagi ASN		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		101.250

87	Kegiatan 9 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Polisi Pamong Praja		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		91.159	Kegiatan 9 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Polisi Pamong Praja		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		91.159
	Kegiatan 10 : Pelatihan Peningkatan Motivasi Kerja bagi ASN		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		95.200	Kegiatan 10 : Pelatihan Peningkatan Motivasi Kerja bagi ASN		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		95.200
88	Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi umum jabatan administrasi					Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi umum jabatan administrasi				
89	Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi pilihan jabatan administrasi					Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi pilihan jabatan administrasi				
90	Kegiatan 13 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional					Kegiatan 13 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional				
91	PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Manajerial		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik			PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Manajerial		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik		
92	Kegiatan 1 : Diklat Kepemimpinan Tk.III Angkatan XI		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	5.057.1 16	Kegiatan 1 : Diklat Kepemimpinan Tk.III Angkatan XI		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	5.057.1 16

93	Kegiatan 2 : Diklat Kepemimpinan Tk.IV Angkatan XII		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		1.224.3 96	Kegiatan 2 : Diklat Kepemimpinan Tk.IV Angkatan XII		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		1.224.3 96	
94	Kegiatan 3 : Pelatihan Dasar bagi CPNS Provinsi Jambi		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		1.238.4 30	Kegiatan 3 : Pelatihan Dasar bagi CPNS Provinsi Jambi		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		1.238.4 30	
95	Kegiatan 4 : Diklat Peningkatan kapasitas Camat		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		1.833.8 85	Kegiatan 4 : Diklat Peningkatan kapasitas Camat		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		1.833.8 85	
96	Kegiatan 5 : Diklat Peningkatan kapasitas Lurah		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		338.51 5	Kegiatan 5 : Diklat Peningkatan kapasitas Lurah		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		338.51 5	
97	Kegiatan 6 : Diklat Komunikasi dan Public Speaking		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		87.300	Kegiatan 6 : Diklat Komunikasi dan Public Speaking		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		87.300	
98	Kegiatan 7 : Diklat Manajemen kepemimpinan dan kecerdasan emosi bagi pejabat eselon III/IV		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		88.385	Kegiatan 7 : Diklat Manajemen kepemimpinan dan kecerdasan emosi bagi pejabat eselon III/IV		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		88.385	
99	Kegiatan 8 : Diklat Manajemen kinerja bagi pejabat eselon III/IV		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		74.617	Kegiatan 8 : Diklat Manajemen kinerja bagi pejabat eselon III/IV		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		74.617	
100	Kegiatan 9 : Diklat Pembekalan kepemimpinan bagi jabatan pengawas		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		83.485	Kegiatan 9 : Diklat Pembekalan kepemimpinan bagi jabatan pengawas		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		83.485	

101	Kegiatan 10 : Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah				88.072	Kegiatan 10 : Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah				88.072	
102	Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural					Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural					
103	Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan					Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan					

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat kabupaten yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Provinsi, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang. Pada forum PD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BPSDM. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan BPSDM Provinsi Jambi seperti tersaji dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 12. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Target	Rupiah (000)	
1	PROGRAM: <i>Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan</i>	Provinsi Jambi	Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus	75%	1.198.361	
2	Kegiatan 1 : Fokus Group Discussion LSP-PDN			-	53.940	

3	Kegiatan 2 : Studi Tiru LSP-PDN			-	70.175	
4	Kegiatan 3 : TOT Pempimdagri			-	112.330	
5	Kegiatan 4 : Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kabupaten/kota			-	149.910	
6	Kegiatan 5 : Pelaksanaan Akreditasi Lembaga			-	294.825	
7	Kegiatan 6 : Diklat Analisis Kebutuhan Sistem Informasi bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (AKSI OPD)			-	259.500	
8	Kegiatan 7 : Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetens			-	71.275	
9	Kegiatan 8: Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri/Kurikulum/ Silabi/Modul			-	119.675	
10	Kegiatan 9 : Monitoring Evaluasi			-	66.730	

	Penyelenggaraan PElatihan					
11	Kegiatan 10 : Sertifikasi Kompetensi			-	-	
12	Kegiatan 11 : Pengelolaan dan tenaga pengembangan Kompetensi			-	-	
13	Kegiatan 12 : Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama			-	-	
14	PROGRAM: <i>Pengembangan Kompetensi Teknis Inti</i>		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	1.300.200	
15	Kegiatan 1 : Diklat Teknis Inti pengelolaan Keuangan Desa		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		86.550	
16	Kegiatan 2 : Diklat Kewirausahaan purna bhakti bagi ASN		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		301.255	

17	Kegiatan 3 : Diklat Pengembangan Pariwisata		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		320.155	
18	Kegiatan 4 : Diklat Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		89.550	
19	Kegiatan 5 : Diklat Perencanaan Penganggaran		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		86.550	
20	Kegiatan 6 : Pendataan kebutuhan pengembangan kompetensi Teknis Inti		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		15.835	
21	Kegiatan 7 : Diklat Pengelolaan Aset daerah				86.550	
22	Kegiatan 8 : Diklat Kearsipan				78.438	
23	Kegiatan 9 : Diklat Teknis Pemandu Wisata				78.438	
24	Kegiatan 10 : Diklat Teknis Sanitasi Lingkungan				78.438	

25	Kegiatan 11 : Diklat Teknis Penilaian Koperasi				78.438	
26	Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan					
27	Kegiatan 13 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib non pelayanan dasar					
28	Kegiatan 14 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm perangkat daerah penunjang					
29	PROGRAM: <i>Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional</i>		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	1.487.594	
30	Kegiatan 1 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan		338.175	

	Pengelola Perpustakaan bagi Guru SLTA		nilai baik			
31	Kegiatan 2 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		360.935	
32	Kegiatan 3 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Revolusi Mental bagi Pejabat Eselon IV		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		95.375	
33	Kegiatan 4 : Pelatihan KTI bagi Guru SMA dan SMK		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		105.450	
34	Kegiatan 5 : Pelatihan Penyusunan DUPAK bagi Guru SMA dan SMK		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		104.950	
35	Kegiatan 6 : Pelatihan Pengembangan Budaya Organisasi/Budaya lokal		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		95.375	

36	Kegiatan 7 : Pelatihan Analisis Jabatan bagi ASN Provinsi/Kabupaten /Kota		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		99.725	
37	Kegiatan 8 : Pelatihan Pengembangan Perkotaan berbasis tata ruang dan ekosistem bagi ASN		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		101.250	
38	Kegiatan 9 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Polisi Pamong Praja		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		91.159	
39	Kegiatan 10 : Pelatihan Peningkatan Motivasi Kerja bagi ASN		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		95.200	
40	Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi umum jabatan administrasi					
41	Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi pilihan jabatan administrasi					

42	Kegiatan 13 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional					
43	PROGRAM: <i>Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Manajerial</i>		Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik			
44	Kegiatan 1 : Diklat Kepemimpinan Tk.III Angkatan XI		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	97 %	5.057.116	
45	Kegiatan 2 : Diklat Kepemimpinan Tk.IV Angkatan XII		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		1.224.396	
46	Kegiatan 3 : Pelatihan Dasar bagi CPNS Provinsi Jambi		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		1.238.430	
47	Kegiatan 4 : Diklat Peningkatan kapasitas Camat		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		1.833.885	

48	Kegiatan 5 : Diklat Peningkatan kapasitas Lurah		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		338.515	
49	Kegiatan 6 : Diklat Komunikasi dan Public Speaking		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		87.300	
50	Kegiatan 7 : Diklat Manajemen kepemimpinan dan kecerdasan emosi bagi pejabat eselon III/IV		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		88.385	
51	Kegiatan 8 : Diklat Manajemen kinerja bagi pejabat eselon III/IV		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		74.617	
52	Kegiatan 9 : Diklat Pembekalan kepemimpinan bagi jabatan pengawas		Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik		83.485	
53	Kegiatan 10 : Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah				88.072	
54	Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural					

55	Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan					

BAB III
TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Tela'ah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran. Kebijakan Nasional Bidang Kepegawaian khususnya Pendidikan dan Pelatihan :

Tabel 13. Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No	Jenis Kebijakan Nasional / Provinsi
1	Perbaikan Tata Kelola Pemerintah <i>Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i> <ul style="list-style-type: none">o Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik
2	<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i> <ul style="list-style-type: none">- Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik
3	<i>Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i> <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi- Penataan kelembagaan instansi pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasi- Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah- Pengembangan manajemen SDM Aparatur- Sistem Seleksi PNS melalui <i>CAT System</i>- Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>- Penerapan <i>e-Arsip</i>- Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur
4	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan isu/kebijakan nasional berupa :</i> <ul style="list-style-type: none">- Perluasan penerapan <i>e-service</i> untuk pelayanan publik

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik - Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi - Pembentukan unit Pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi - Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan profesional |
|--|---|

Khusus dibidang aparatur yang menjadi strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah dengan pengembangan manajemen SDM aparatur berupa ***peningkatan sistem merit*** dalam manajemen kepegawaian, serta ***peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai***. Adapun indikator untuk penerapan sistem merit adalah berupa persentase penerapan sistem merit di setiap instansi. Sedangkan indikator untuk peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai berupa persentase pegawai yang mengikuti assesment sesuai kebutuhan, persentase pegawai yang mengikuti diklat wajib dan persentase penilaian kinerja pegawai berbasis prestasi kerja.

Sedangkan hasil perumusan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 pada misi kesatu yakni: ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif serta berorientasi Pelayanan Publik***. kebijakan yang diperlukan adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tujuannya “mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel” dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelola dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Strategi yang dilakukan yakni meningkatkan kualitas pengelolaan dan meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur. Strategi meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur arah kebijakannya adalah meningkatnya kapasitas dan

kapabilitas aparatur melalui penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan suatu program dan kegiatan harus terus dilakukan secara berkelanjutan (*never ending process*). Untuk itu, komitmen yang sungguh-sungguh dari Pengelola, Penyelenggara dan Widyaiswara serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pembaharuan guna meningkatkan kompetensi aparatur, merupakan suatu keharusan bagi terwujudnya kebijakan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dalam rangka pembaharuan secara esensial menjadi *leverage* yang berbasis kompetensi. Maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

T u j u a n

- a. Mengembangkan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan aparatur yang efektif
- b. Mengembangkan kelembagaan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan aparatur

S a s a r a n

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan yakni;

- a. Meningkatnya kompetensi Aparatur melalui program dan kegiatan yang relevan sesuai dengan kebutuhan
- b. Meningkatnya sumber daya kediklatan yang memadai

3.3. Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat 8 (delapan) program dan 65 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 15.300.000.000.- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah). Adapun rincian program dan kegiatan dari Belanja Langsung sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
- g. Penyediaan makanan dan minuman
- h. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis Perkantoran
- i. Keikutsertaan rapat-rapat koordinasi/konsultasi/pembinaan kediklatan dalam dan luar daerah
- j. Pelayanan dokumentasi, publikasi dan arsip
- k. Penyediaan pelayanan keamanan kantor

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan Gedung/Sarana kantor
- b. Pengadaan peralatan kantor
- c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- d. Penambahan/revitalisasi jaringan instalasi listrik
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- i. Penyediaan sarana dan pengelolaan air bersih.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

4. Program Manajemen Pelayanan Kediklatan

- a. Bimbingan teknis/diklat aparatur internal
- b. Penyusunan renstra, renja, capaian kinerja dan realisasi anggaran SKPD

- c. Rapat koordinasi pengembangan SDM
 - d. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan SDM aparatur
 - e. Penyelenggaraan seminar/lokakarya/workshop pengembangan program dan kegiatan BPSDM.
- 5.** Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan
- a. Fokus Group Discussion LSP-PDN
 - b. Studi Tiru LSP-PDN
 - c. TOT Pimpemdagri
 - d. Montiroing Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kabupaten/Kota
 - e. Diklat Analisis Kebutuhan Sistem Informasi bagi OPD diLingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (AKSI OPD)
 - f. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
 - g. Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri/Kurikulum/Silabi/Modul
 - h. Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
- 6.** Program Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
- a. Diklat teknis inti pegelolaan keuangan desa
 - b. Diklat teknis inti kewirausahaan purna bakti bagi ASN
 - c. Diklat teknis inti pengembangan pariwisata
 - d. Diklat teknis inti dasar manajemen penanggulangan bencana
 - e. Diklat teknis inti dasa perencanaan dan penganggaran responsif gender
 - f. Pendataan kebutuhan pengembangan kompetensi teknis inti
 - g. Diklat teknis inti pengelolaan aset daerah
 - h. Diklat teknis inti manajemn kearsipan
 - i. Diklat teknis inti pemandu wisata
 - j. Diklat teknis inti sanitasi lingkungan
 - k. Diklat teknis inti penilaian koperasi
- 7.** Program pengembangan komptensi teknis umum dan fungsional
- a. Pelatihan pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan bagi guru SLTA
 - b. Pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian

- c. Pelatihan pengembangan revolusi mental bagi pejabat eselon IV
- d. Pelatihan karya tulis ilmiah bagi guru SMA dan SMK
- e. Pelatihan penyusunan daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK) bagi guru SMA dan SMK
- f. Pelatihan pengembangan budaya organisasi/budaya lokal
- g. Pelatihan analisis jabatan bagi ASN Prov/kab/kota
- h. Pelatihan pengembangan kompetensi polisi pamong praja
- i. Pelatihan pengembangan motivasi kerja bagi ASN prov/kab/kota
- j. Pelatihan pengembangan perkotaan berbasis tata ruang dan ekosistem bagi ASN prov/kab/kota

8. Program Pengembangan Kompetensi Manajerial

- a. Diklat Kepeimpinan TK III
- b. Diklat Kepemimpinan TK IV
- c. Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil
- d. Diklat peningkatan kapasitas camat
- e. Diklat peningkatan kapasitas lurah
- f. Diklat komunikasi dan publik speaking
- g. Diklat manajemen kepemimpinan dan kecerdasan emosi bagi pejabat eselon III/IV/diklat manajemen kinerja bagi pejabat
- h. Diklat manajemen kinerja bagi pejabat eselon III/IV
- i. Diklat pembekalan kepemimpinan bagi jabatan pengawas

Langkah-langkah yang diambil untuk pencapaian target yang telah ditetapkan BPSDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja BPSDM Provinsi Jambi tahun 2019
- b. Menyusun tahapan kegiatan/anggaran
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan

Indikator Kinerja BPSDM Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 -2021, pada misi kesatu yakni: ***Meningkatkan Tata Kelola***

Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Bersih. Transparan. Akuntabel dan Partisipatif serta berorientasi Pelayanan Publik.

Kebijakan yang diperlukan adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*. Dalam Misi ke -1 RPJMD Provinsi Jambi tujuan yang hendak dicapai oleh BPSDM Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun depan adalah ***Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kompetensi, Dedikasi dan Integritas***

dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 14. indikator kinerja utama BPSDM :

d.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Peserta Pengembangan SDM yang dinyatakan telah selesai dan <i>lulus dengan nilai minimal baik</i>	-	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	100 %	100 %
2	Persentase Peserta <i>Lulus Uji Kompetensi</i>	-	-	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %	75 %
3	Peserta Pengembangan SDM yang <i>menyatakan minimal puas terhadap pelayanan pelaksanaan pengembangan SDM Aparatur</i>	-	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %

Tabel 15. RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 BESERTA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	PROGRAM: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi Jambi	12 Bulan	2.922.085	APBD		12 Bulan	4.550.000.000
2	<u>Kegiatan 1 :</u> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan benda pos materai, perangko dan benda pos guna pengelolaan surat-surat dinas	Provinsi Jambi	12 Bulan	5.000	APBD		12 Bulan	35.000.000
3	<u>Kegiatan 2 :</u> Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan biaya untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet kantor guna mendukung kelancaran tugas	Provinsi Jambi	12 Bulan	1.302.000	APBD		12 Bulan	1.350.000.000
4	<u>Kegiatan 3 :</u> Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan tenaga pemeliharaan/perawatan kantor untuk jasa kebersihan kantor guna kenyamanan lingkungan kantor	Provinsi Jambi	12 Bulan	400.000	APBD		12 Bulan	570.000.000
5	<u>Kegiatan 4 :</u> Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia guna mendukung kelancaran tugas	Provinsi Jambi	12 Bulan	89.905	APBD		12 Bulan	165.000.000
	<u>Kegiatan 5 :</u> Penyediaan Barang Cetak	Jenis barang cetak dan penggandaan guna mendukung kelancaran tugas	Provinsi Jambi	12 Bulan	60.000	APBD		12 Bulan	65.000.000

	dan Penggandaan	kedinasan							
	<u>Kegiatan 6 :</u> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung dan halaman kantor guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Provinsi Jambi	12 Bulan	72.640	APBD		12 Bulan	135.000.000
	<u>Kegiatan 7 :</u> Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar, majalah dan buku kepastakaan guna mendukung peningkatan pengetahuan pegawai dan peserta diklat	Provinsi Jambi	12 Bulan	0	APBD		12 Bulan	60.000.000
	<u>Kegiatan 8 :</u> Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu kedinasan guna mendukung kelancaran tugas	Provinsi Jambi	12 Bulan	85.665	APBD		12 Bulan	230.000.000
	<u>Kegiatan 9 :</u> Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tingkat pemenuhan honorarium panitia pelaksana kegiatan, pengelola keuangan SKPD	Provinsi Jambi	12 Bulan	229.841	APBD		12 Bulan	350.000.000
	<u>Kegiatan 10 :</u> Pelayanan Pelayanan Administrasi Barang	Tingkat pemenuhan honorarium panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, pengurus dan penyimpan barang SKPD	Provinsi Jambi	12 Bulan	0	APBD		12 Bulan	60.000.000
	<u>Kegiatan 11 :</u> Keikutsertaan Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan Kediklatan Dalam dan	Tingkat keikutsertaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan dan undangan di dalam dan luar daerah	Provinsi Jambi	12 Bulan	400.000	APBD		12 Bulan	1.100.000.000

	Luar Daerah								
	<u>Kegiatan 12 :</u> Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip	Jenis dokumentasi dan publikasi kegiatan kantor	Provinsi Jambi	12 Bulan	73.634	APBD		12 Bulan	60.000.000
	<u>Kegiatan 13 :</u> Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Tingkat pemenuhan honorarium Tim Angka Kredit. Tim penjamin mutu SKPD	Provinsi Jambi	12 Bulan	0	APBD		12 Bulan	50.000.000
	<u>Kegiatan 14 :</u> Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah kebutuhan dan honorarium tenaga keamanan kantor	Provinsi Jambi	12 Bulan	203.400	APBD		12 Bulan	175.000.000
	<u>Kegiatan 15 :</u> Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kinerja	Provinsi Jambi	12 Bulan	0	APBD		12 Bulan	150.000.000
II	<u>PROGRAM :</u> Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kantor	Provinsi Jambi	100 %	2.437.082	APBD		100 %	1.865.000.000
	<u>Kegiatan 1:</u> Pembangunan Gedung / Sarana kantor	Jumlah kebutuhan Bangunan gedung kantor guna pelaksanaan kinerja	Provinsi Jambi	100 %	187.000	APBD		100 %	200.000.000
	<u>Kegiatan 2 :</u> Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah dan Jenis kebutuhan pengadaan peralatan gedung kantor	Provinsi Jambi	100 %	153.732	APBD		100 %	200.000.000
	<u>Kegiatan 3:</u>	Terlaksananya pengadaan	Provinsi	100 %	481.400	APBD		100 %	200.000.000

	Pengadaan Perlengkapan kantor	perlengkapan gedung kantor	Jambi						
	<u>Kegiatan 4 :</u> Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang rusak diperbaiki dan jumlah bagian gedung kantor yang kotor dibersihkan	Provinsi Jambi	12 Bulan	200.000	APBD		12 Bulan	320.000.000
	<u>Kegiatan 5 :</u> Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor dan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Provinsi Jambi	12 Bulan	259.450	APBD		12 Bulan	350.000.000
	<u>Kegiatan 6:</u> Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor untuk kelancaran kegiatan operasional pada Bandiklatda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	12 Bulan	550.000	APBD		12 Bulan	500.000.000
	<u>Kegiatan 7 :</u> Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas kedinasan	Provinsi Jambi	12 Bulan	205.500	APBD		12 Bulan	269.640.000
	<u>Kegiatan 8 :</u> Penyediaan Pemasangan /Revitalisasi Jaringan Instalasi Listrik/Air dan Internet	Tingkat pemenuhan kebutuhan pemasangan/penggantian jaringan instalasi listrik/Air dan Internet untuk kegiatan kantor, belajar dan asrama	Provinsi Jambi	100 %	200.000	APBD		100 %	200.000.000
	<u>Kegiatan 9 :</u> Revitalisasi Jaringan Instalasi Air Bersih	Jumlah dan jenis Jasa yang dibutuhkan guna pelaksanaan Revitalisasi Jaringan Instalasi Air Bersih	Provinsi Jambi	100 %	200.000	APBD		100 %	200.000.000
	<u>Kegiatan 10 :</u>	Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan	Provinsi	100 %	-	APBD		100 %	365.000.000

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	dinas/operasional berupa mobil dinas dan sepeda motor	Jambi						
III	PROGRAM: Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Kerja Pegawai	Provinsi Jambi	105 Orang	-	APBD		105 Orang	85.000.000
	<u>Kegiatan 1 :</u> Pengadaan Pakaian Dinas	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	Provinsi Jambi	105 Orang	78.000	APBD		105 Orang	85.000.000
	<u>Kegiatan 2 :</u> Pengadaan Pakian Tradisional Melayu Jambi	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	Provinsi Jambi	105 Orang	78.000	APBD		105 Orang	-
	<u>Kegiatan 3 :</u> Pengadaan pakaian batik Jambi	Jenis dan jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan guna mendukung disiplin berpakaian pegawai	Provinsi Jambi	105 Orang	-	APBD		105 Orang	
IV	PROGRAM : Manajemen Pelayanan Kediklatan	Persentase Keterlaksanaan Penyelenggaraan Diklat	Provinsi Jambi	100 %	-	APBD		100 %	1.050.000.000
	<u>Kegiatan 1 :</u> Bimbingan Teknis / Diklat Aparatur Internal	Terlatihnya Aparatur Internal	Provinsi Jambi	25 Org	320.815	APBD		25 Org	401.100.000
	<u>Kegiatan 2 :</u> Penyusunan Renstra. Renja dan Capaian Kinerja	Tersedianya Dokumen Perencanaan Program. Kegiatan. dan Pelaporan Keuangan	Provinsi Jambi	3 laporan	139.450	APBD		3 Dkm	150.000.000

	<u>Kegiatan 3 :</u> Penyelenggaraan Rakor Kediklatan	Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi Kediklatan	Provinsi Jambi	2 Kali	115.513	APBD		2 Kali	225.000.000
	<u>Kegiatan 4 :</u> Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pasca Kediklatan	Terhimpunnya Informasi Penyelenggaraan Diklat	Provinsi Jambi	6 Bidang	121.821	APBD		6 Bidang	225.000.000
	<u>Kegiatan 5 :</u> Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	Provinsi Jambi	400 Exemp	0	APBD		400 Exemp	100.000.000
	<u>Kegiatan 6 :</u> Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	Terlaksananya Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Kediklatan	Provinsi Jambi	0	0	APBD		-	-
	<u>Kegiatan 7 :</u> Penyelenggaraan seminar/lokakarya/workshop pengembangan program dan kegiatan BPSDM		Provinsi Jambi	0	81.959	APBD		-	-
	<u>PROGRAM:</u> Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-

Kegiatan 1 : Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Terlaksananya sertifikasi kompetensi aparatur	Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 2 : Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Terlaksananya diklat Teknis. Tugas dan Fungsi Aparatur	Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 3 : Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	Terlaksananya Diklat tenaga Aparatur Fungsional	Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 4 : Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Terlaksananya diklat Manajerial, Kepemimpinan dan Prajabatan bagi Aparatur	Provinsi Jambi	690 Orang	-	APBD		690 Orang	2.788.400.000
PROGRAM: Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus	Provinsi Jambi	72%	-	APBD		-	-
Kegiatan 1 : Fokus Group Discussion LSP-PDN		Provinsi Jambi	-	-	APBD		-	-
Kegiatan 2 : Studi Tiru LSP-PDN		Provinsi Jambi	-	-	APBD		-	-
Kegiatan 3 :		Provinsi Jambi	-	112.330	APBD		-	-

	TOT Pempindagri								
	Kegiatan 4 : Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Kabupaten/kota		Provinsi Jambi	-	149.910	APBD		-	-
	Kegiatan 5 : Pelaksanaan Akreditasi Lembaga		Provinsi Jambi	-	294.825	APBD		-	-
	Kegiatan 6 : Diklat Analisis Kebutuhan Sistem Informasi bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (AKSI OPD)		Provinsi Jambi	-	259.500	APBD		-	-
	Kegiatan 7 : Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi		Provinsi Jambi	-	71.275	APBD		-	-
	Kegiatan 8: Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri/Kurikulum/Silabi/Modul		Provinsi Jambi	-	119.675	APBD		-	-
	Kegiatan 9 : Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan PELatihan		Provinsi Jambi	-	66.730	APBD		-	-
	Kegiatan 10 : Sertifikasi Kompetensi		Provinsi Jambi	-	-	APBD		-	-

	Kegiatan 11 : Pengelolaan dan tenaga pengembangan Kompetensi		Provinsi Jambi	-	-	APBD		-	-
	Kegiatan 12 : Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama		Provinsi Jambi	-	-	APBD		-	-
	PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi	97 %	1.300.200	APBD		-	-
	Kegiatan 1 : Diklat Teknis Inti pengelolaan Keuangan Desa	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi	-	86.550	APBD		-	-
	Kegiatan 2 : Diklat Kewirausahaan purna bhakti bagi ASN	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi	-	301.255	APBD		-	-
	Kegiatan 3 : Diklat Pengembangan Pariwisata	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi	-	320.155	APBD		-	-
	Kegiatan 4 : Diklat Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi	97 %	89.550	APBD		-	-

Kegiatan 5 : Diklat Perencanaan Penganggaran	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		86.550	APBD	-	-
Kegiatan 6 : Pendataan kebutuhan pengembangan kompetensi Teknis Inti	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi	-	15.835	APBD	-	-
Kegiatan 7 : Diklat Pengelolaan Aset daerah		Provinsi Jambi	-	86.550	APBD	-	-
Kegiatan 8 : Diklat Kearsipan		Provinsi Jambi	-	78.438	APBD	-	-
Kegiatan 9 : Diklat Teknis Pemandu Wisata		Provinsi Jambi	-	78.438	APBD	-	-
Kegiatan 10 : Diklat Teknis Sanitasi Lingkungan		Provinsi Jambi	-	78.438	APBD	-	-

	Kegiatan 11 : Diklat Teknis Penilaian Koperasi		Provinsi Jambi	-	78.438	APBD		-	-
	Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan		Provinsi Jambi			APBD		-	-
	Kegiatan 13 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm urusan Konkuren wajib non pelayanan dasar		Provinsi Jambi			APBD		-	-
	Kegiatan 14 : Pengembangan Kompetensi inti jabatan adm perangkat daerah penunjang		Provinsi Jambi			APBD		-	-
	PROGRAM: Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		1.487.594	APBD		-	-

dan Fungsional									
	Kegiatan 1 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pengelola Perpustakaan bagi Guru SLTA	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		338.175	APBD		-	-
	Kegiatan 2 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		360.935	APBD		-	-
	Kegiatan 3 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Revolusi Mental bagi Pejabat Eselon IV	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		95.375	APBD		-	-
	Kegiatan 4 : Pelatihan KTI bagi Guru SMA dan SMK	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		105.450	APBD		-	-
	Kegiatan 5 : Pelatihan Penyusunan DUPAK bagi Guru SMA dan SMK	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		104.950	APBD		-	-

	Kegiatan 6 : Pelatihan Pengembangan Budaya Organisasi/Budaya lokal	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		95.375	APBD		-	-
	Kegiatan 7 : Pelatihan Analisis Jabatan bagi ASN Provinsi/Kabupaten/Kota	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		99.725	APBD		-	-
	Kegiatan 8 : Pelatihan Pengembangan Perkotaan berbasis tata ruang dan ekosistem bagi ASN	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		101.250	APBD		-	-
	Kegiatan 9 : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Polisi Pamong Praja	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		91.159	APBD		-	-
	Kegiatan 10 : Pelatihan Peningkatan Motivasi Kerja bagi ASN	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		95.200	APBD		-	-

Kegiatan 11 :		Provinsi Jambi			APBD		-	-
Pengembangan Kompetensi umum jabatan administrasi								
Kegiatan 12 :		Provinsi Jambi			APBD		-	-
Pengembangan Kompetensi pilihan jabatan administrasi								
Kegiatan 13 :		Provinsi Jambi			APBD		-	-
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional								
<u>PROGRAM:</u> <i>Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Manajerial</i>	Peserta diklat yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi			APBD		-	-
Kegiatan 1 : Diklat Kepemimpinan Tk.III Angkatan XI	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		5.057.116	APBD		-	-

Kegiatan 2 : Diklat Kepemimpinan Tk.IV Angkatan XII	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		1.224.396	APBD		-	-
Kegiatan 3 : Pelatihan Dasar bagi CPNS Provinsi Jambi	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		1.238.430	APBD		-	-
Kegiatan 4 : Diklat Peningkatan kapasitas Camat	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		1.833.885	APBD		-	-
Kegiatan 5 : Diklat Peningkatan kapasitas Lurah	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		338.515	APBD		-	-
Kegiatan 6 : Diklat Komunikasi dan Public Speaking	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		87.300	APBD		-	-
Kegiatan 7 : Diklat Manajemen kepemimpinan dan kecerdasan emosi bagi	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		88.385	APBD		-	-

	pejabat eselon III/IV								
	Kegiatan 8 : Diklat Manajemen kinerja bagi pejabat eselon III/IV	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		74.617	APBD		-	-
	Kegiatan 9 : Diklat Pembekalan kepemimpinan bagi jabatan pengawas	Peserta yang dinyatakan selesai dan lulus dengan nilai baik	Provinsi Jambi		83.485	APBD		-	-
	Kegiatan 10 : Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah		Provinsi Jambi		88.072	APBD		-	-
	Kegiatan 11 : Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural		Provinsi Jambi			APBD		-	-
	Kegiatan 12 : Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan		Provinsi Jambi			APBD		-	-

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi diorientasikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang diukur dengan kualitas dan kuantitas peserta dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil. pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan sinergitas dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program dengan unit-unit kerja/instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat. provinsi. kabupaten/kota sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. maka Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sangat diharapkan dapat dijadikan bahan kajian sehingga keberadaannya dapat mendukung Pemerintahan Provinsi Jambi dimasa yang akan datang.

Jambi, Desember 2018
KEPALA BADAN

H.M.ISKANDAR NASUTION.SH.M.SI

Pembina Utama Madya

NIP. 19650331 199403 1 006